

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi, tetapi telah beralih ke desentralisasi. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk secara leluasa mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Tujuan utama dari menjalankan otonomi daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi. Ada beberapa faktor seperti, investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja dan lain-lain.

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategi dan potensial pada wilayah baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur

kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode. Sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya (Regina, et al., 2020).

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berjuang pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah diuntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik Menurut (Pilat dan Morasa, 2017).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, maupun bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang di dukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menjalin tersenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka di perlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan upaya meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun penggalan sumber daya PAD baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperlihatkan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah,

meningkatkan dan menyamaratakan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 1984 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintah daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam (Undang-Undang No.5 Tahun 1974) tentang pajak dan retribusi daerah dimasukan menjadi PAD. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2007).

Demi meraih keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha sebaik mungkin dalam hal peningkatan kinerja untuk mengelolah keuangan. Anggaran yang sudah dikelolah oleh pemerintah daerah selanjutnya dibuat laporan pertanggung jawaban setiap periode untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam bentuk laporan keuangan daerah. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu tahun periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah di pahami pembaca laporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya Mahmudi (2010) Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosoal dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan

dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Pramono, 2014).

Penelitian yang dilakukan Endang (2021) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, dan Rasio Keserasian. (Pramono, 2014) menunjukkan hasil penelitian yang sama adalah kinerja keuangan Pemkot surakarta yang masih kurang adalah dari aspek kemandirian dan aspek keserasian.

Penelitian yang dilakukan Nurhayai (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan Kinerja Keuangan daerah pemkab Rokan Hulu dalam empat tahun terakhir terbukti baik jika dilihat dari rasio Efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Namun dikatakan kurang baik jika dilihat dari rasio Kemandirian,

rasio keserasian, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Penelitian replikasi dari Assidiqi (2016) juga menunjukkan hasil penelitian yang sama menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara belanja Operasi Dengan Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Serli, et al., (2022) dengan perbedaan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini peneliti menambahkan tiga indikator yaitu Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Serli, et al., (2020) dengan judul Analisis Dari Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2019-2021 sedangkan penelitian ini mengambil objek pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan Judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui keuangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan Mahmudi, (2010). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai

Kabupaten Kepulauan Sula dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula. Bahwa maksud dari pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberikan kesempatan wilayah-wilayah berpotensi dan layak untuk berkembang. Kabupaten Kepulauan Sula merupakan daerah otonomi yang dalam desentralisasi tidak hanya menerima dana dari pemerintah pusat tetapi juga mengelolah sumber PAD sendiri. Sumber PAD Kabupaten Kepulauan Sula berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan realisasi anggaran Kabupaten Kepulauan Sula dapat disimpulkan pada tahun 2019-2022 PAD mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Kepulauan Sula mencapai Rp. 33.834.314.579,22, pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 24.453.262.874,71, kemudian pada tahun 2021 turun dengan dengan nilai PAD sebesar Rp. 16.212.822.319,89, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kenaikan sebesar Rp 23.178.736.296,60 Dan total belanja naik turun setiap tahunnya pada tahun 2019 Pada tahun 2019 Total belanja mencapai Rp.691.646.063.166,42, pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp. 655.458.756.812,23 selain itu pada tahun 2021 total belanja mengalami kenaikan menjadi Rp. 660.508.678.069,80 kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 687,639.521.409,36

Laporan keuangan merupakan salah satu media utama dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Hasil dari laporan keuangan tersebut digunakan untuk membuat dasar pengambilan keputusan-keputusan berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Ini dikarenakan para pihak yang berkepentingan tersebut datang dari latar belakang yang berbeda dan belum tentu memahami sistem akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu para pihak yang berkepentingan tersebut dalam memahami laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam mengelola keuangan daerahnya, dengan berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian dengan **JUDUL ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Efektifitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama tahun 2019-2022 dilihat dari rasio Efektifitas.
2. Untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama tahun 2019-2022 dilihat dari rasio Efisiensi.
3. Untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama tahun 2019-2022 dilihat dari rasio Kemandirian.
4. Untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama tahun 2019-2022 dilihat dari rasio Keserasian.
5. Untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selama tahun 2019-2022 dilihat dari rasio Pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarakan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. **Manfaat Praktis**

Memberikan ukuran sejauh mana tingkat Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dari waktu ke waktu selama periode 4 tahun, Sehingga Pemerintah terpacuh untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode -periode berikutnya.

3. **Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam penusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.